

Realisasi Pendapatan APBD Lampung 2019 Capai 98,58 Persen



Ilustrasi nusantara9news.com

Bandar Lampung (Lampost.co) --Realisasi pendapatan daerah Lampung tahun 2019 tercatat Rp7,266 triliun atau terealisasi 98,58 persen dari total target anggaran Rp7,371 triliun. Jumlah itu berasal dari PAD Rp3,018 triliun atau 101,03 persen; pendapatan transfer Rp2,671 triliun atau terealisasi 61,13 persen; dan lain-lain pendapatan yang sah Rp1,577 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran (TA) 2019 yang disampaikan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Senin, 13 Juli 2020.

“Peningkatan realisasi yang cukup signifikan dikarenakan relasifikasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari akun dana alokasi khusus (DAK) nonfisik ke akun pendapatan lainnya,” kata Nunik.

Sedangkan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 terealisasi Rp7,058 triliun atau terealisasi 94,25 persen dari total anggaran belanja Rp7,489 Triliun. Dari sisi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan terealisasi Rp213 miliar yang bersumber dari penerimaan silpa tahun 2018 serta pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp86 miliar yang merupakan penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

“Selanjutnya perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto diperoleh selisih yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2019 Rp336 miliar. Nilai tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan pelaksanaan APBD 2020,” ujar Nunik.

Pemprov Lampung menyadari masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki guna mendorong Lampung menjadi provinsi yang lebih maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya. Dia menjelaskan Lampung memperoleh Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Menurut Wagub, prestasi ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Seiring era keterbukaan publik, Pemerintah Provinsi Lampung juga berperan dalam menyampaikan informasi atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran yang di dalamnya menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola pemprov tahun anggaran 2019," katanya.

Sumber Berita:

Lampungpost, Senin, 13 Juli 2020/ <https://www.lampost.co/berita-realisisasi-pendapatan-apbd-lampung-2019-capai-98-58-persen.html>

Catatan:

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami agar proses pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan efisien dan efektif, sebagai berikut:

1. Penajaman Peran Person In Charge (PIC) Anggaran

Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut adanya PIC anggaran pada setiap unit/divisi. PIC anggaran tersebut bertugas untuk menyusun RKAKL unit/divisi yang bersangkutan. Prinsip penyusunan detail anggaran adalah kombinasi antara top down dan bottom up, sehingga anggaran yang disusun benar-benar merupakan ekspresi keuangan dari rencana kerja bagian/divisi yang bersangkutan. PIC anggaran seharusnya tidak hanya bertugas sebagai rekapitulator atas usulan anggaran dari unit lain. PIC anggaran harus mampu bertindak sebagai narasumber untuk peningkatan pemahaman proses bisnis dan aktivitas keuangan staf atau pimpinan pada unit masing-masing. Hendaknya PIC anggaran harus berani memberikan penjelasan kepada para staf atau pimpinan tentang bagaimana menyusun dan mengelola anggaran dengan benar, sehingga anggaran yang dihasilkan memiliki output yang benar-benar dibutuhkan. PIC anggaran harus mencoba menjelaskan bahwa kegiatan atau output baru sebaiknya tidak dilaksanakan pada tahun berjalan, karena hal ini

akan mengganggu stabilitas pelaksanaan output lainnya. Output baru sebaiknya dilaksanakan pada tahun yang akan datang agar proses penyusunan rencana anggarannya dapat disiapkan dengan baik.

2. Analisis Kebutuhan yang Komprehensif

Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penyusunan analisis kebutuhan adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi kondisi yang ada (existing).
- b. Mengidentifikasi kondisi ideal yang telah ditetapkan. Misalnya standarisasi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Apabila standar ini tidak ada, maka harus disusun asumsi-asumsi ideal yang dibutuhkan oleh unit yang bersangkutan.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan sebagai hasil kesenjangan antara kondisi yang ada (existing) dengan kondisi/asumsi ideal.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan standar/asumsi ideal yang telah ditetapkan.
- e. Mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki.
- f. Menentukan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang dimiliki, misalnya dengan melakukan pemecahan pemenuhan kebutuhan dalam beberapa tahun.

3. Evaluasi Value For Money

Value for money terdiri atas tiga prinsip yaitu, ekonomis, efisien, dan efektif. Di Inggris konsep ini digunakan sebagai alat untuk asesmen efektivitas penganggaran dan belanja sektor publik. Tiga prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip ekonomis berarti bagaimana mendapatkan sumber daya input dengan nilai biaya minimal.
- b. Prinsip efisien berarti bagaimana meminimalkan sumber daya input untuk mendapatkan output tertentu.
- c. Prinsip efektif berarti bagaimana output yang dihasilkan menghasilkan outcome yang telah ditentukan.